



PERATURAN NAGARI KINALI
NOMOR : 02 TAHUN 2017
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
WALI NAGARI KINALI
TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI
TAHUN 2017



WALI NAGARI KINALI

PERATURAN NAGARI KINALI

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALI NAGARI KINALI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KINALI,

- Menimbang :** bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 101 Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang pertanggung Jawaban Wali Nagari wajib menyusun Peraturan Nagari tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 74);
 6. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/818/Bup-Pasbar/2016 Tentang Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Dan Belanja bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran
 7. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/819/Bup-Pasbar/2016 Tentang Penetapan Besaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
 8. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Periode 2015-2020;
 9. Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP)
 10. Peraturan Nagari Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KINALI
dan
WALI NAGARI KINALI
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PERATURAN NAGARI KINALI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALI NAGARI KINALI TAHUN ANGGARAN 2016.

Bab I
Pasal 1

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Bab II
Pasal 2

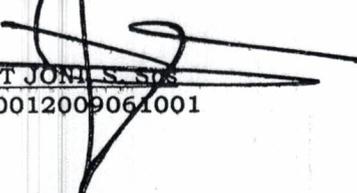
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Kinali
Pada tanggal : 10 Februari 2017
WALI NAGARI KINALI


SYAFRIAL, S. Pd

Diundangkan di Nagari Kinali
Pada Tanggal : 10 Februari 2017
SEKRETARIS NAGARI KINALI


JON HELMAT JONI S. Sds
Nip : 197610012009061001

BERITA ACARA

Nomor : 02 /BA-KB/Wn-Knl-Bamus/II/2017

**KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KINALI
DENGAN
WALI NAGARI KINALI**

TENTANG

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari **Jum'at** tanggal **Sepuluh** Bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertanda

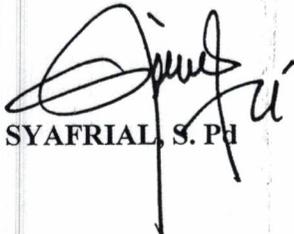
1. SYAFRIAL, S. Pd : Wali Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Kinali, yang beralamat di Kinali Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. ZAINUDDIN SYAM : Ketua Bamus Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bamus Nagari Kinali, yang beralamat di Kinali Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Nagari Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Nagari Tahun Anggaran 2016 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Nagari Tahun Anggaran 2016 .
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (hari) kerja setelah tanggal ditandatangani pada Berita Acara ini.

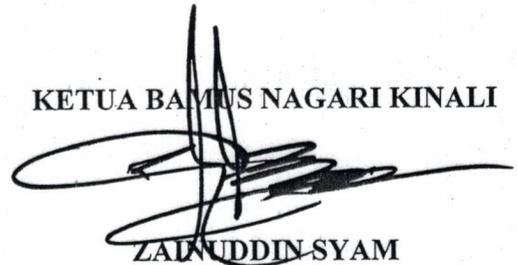
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALI NAGARI KINALI



SYAFRIAL, S. Pd

KETUA BAMUS NAGARI KINALI



ZAINUDDIN SYAM



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI
BAMUS NAGARI KINALI
ALAMAT : JL.M.YUNUS NO. DURIAN KILANGAN KINALI KODE POS 26367

Kinali, 08 Februari 2017

Nomor : 005/ 07/BAMUS/II-2017
Lamp. : -
Perihal : **Undangan.**

Kepada Yth :

1. Bapak Camat Kecamatan Kinali.
2. Wali Nagari Kinali.
3. Wakil Ketua Bamus Beserta Anggota.
4. Ketua LPMN Nagari Kinali
5. Pendamping Desa Kecamatan Kinali.
6. Pendamping Lokal Desa Nagari Kinali.
7. Kepala Jorong Sekanagarian Kinali.

Di

Tempat.

Dengan hormat,

Setelah dilaksanakan Sidang Pleno Bamus Nagari Kinali tanggal 09 Februari 2017 tentang Pembahasan Ranperna LKPJ Nagari Tahun Anggaran 2016 dan Ranperna Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban APB Nagari Tahun 2016, untuk itu perlu dilanjutkan ke Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinali, maka kami undang Bapak/Ibu hadir pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Februari 2017
Pukul : 8.30 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Bamus Nagari Kinali

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

BAMUS NAGARI KINALI

KETUA



ZAINUDDIN SYAM

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

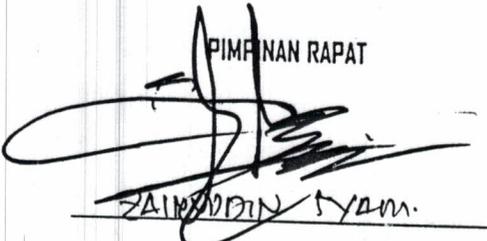
1. Bapak Bupati Pasaman Barat C.q Kepala Bagian Pemerintahan Nagari di Simpang Empat.
2. Peringgal

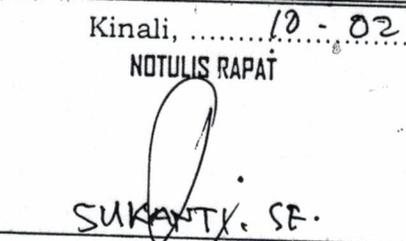
DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal
Acara
Tempat

JUM'AT, 10 FEBRUARI 2017
: SIDANG PIMPINAN BAMUR
: KANTOR BAMUR PAGAWI KINALI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	YUSRIAN	Kep. Jkr. IUKOTO	W. KOTO	1
2	STAFRIL	Ka. Jkr. IUKOTO	IU. KOTO	2
3	H.M. DR. Rhy Basri	BAMUR	Ul. Catur Seldu	3
4	SUPARNO	Ka. Jarong	Kaya	4
5	Susana Smb	- " -	PD. Canduah	5
6	Jannuklin S.	Kebua Bamur	W. KOTO	6
7	Jamadil	Kep. Jkr.	Ub. Brau.	7
8	Aman. Raharjo	Kep. Jarong	S. Agung	8
9	H. ASRI L	Aggt	Kemel	9
10	Amisal	Kep. Jarong	Lungum	10
11	Syarial	Wali Nagari	Kinali	11
12	Asrohi	Ka. Jarong	Wuwah.	12
13	Bejo-S	Kep. Jarong	Fidewahy	13
14	Herdei	Kep. Jarong	W. U. Ulu	14
15	G. Majasdeo	Anggota	Langgam	15
16	Rexa Rena	Anggota	langgam Saijo	16
17	ZILIASIR	Wk. BATTUS	Langgam. Saijo	17
18	STAFRIL	Aggt. Bamur	Dr. Blaye	18
19	SUKANTI. SE	SEK. BAMUR	Sido Muto	19
20	Syahril	Kep. Jarong	Kanduh. Bida	20
21	RIVAI	Kep. Jarong	BUNUK	21
22	Jon Helanz.	W. U. Ulu	W. K. Lung	22
23	JAMIRUS. SP.	PLD	Pd. Canduah	23
24	Sumiani. SE	K. Pem	Kapur Lung	24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35

PIMPINAN RAPAT

ZAIMUDIN SYAM.

Kinali, 10 - 02 - 2017
NOTULIS RAPAT

SUKANTI. SE.

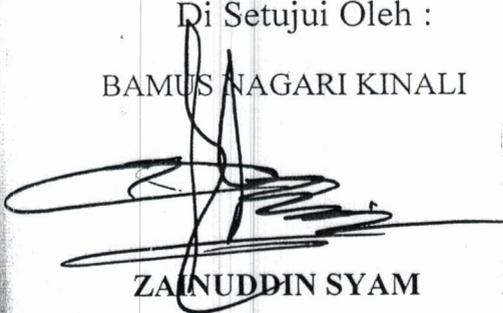
Notulen Rapat Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinali

Pada Hari : Jum,at
Tanggal : 10 Februari 2017
Pimpinan Rapat : Ketua Bamus Nagari Kinali
Tempat : Kantor Bamus Nagari Kinali
Notulis Rapat : Sekretaris Bamus Nagari Kinali
Acara : Sidang Paripurna Bamus Penetapan LKPJ Nagari Tahun 2016 dan Penetapan Ranperna Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban APB Nagari Tahun 2016.

Kesimpulan Rapat: Bamus Nagari Kinali beserta Anggota telah membahas dan menerima serta menetapkan menjadi Perna LKPJ Nagari Tahun 2016 dan Perna Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban Nagari tahun 2016.

Di Setujui Oleh :

BAMUS NAGARI KINALI



ZAINUDDIN SYAM

NOTULIS



SUKANTI, SE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR HUKUM.....	1
B. GAMBARAN UMUM NAGARI.....	2
1. KONDISI GEOGRAFIS.....	2
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.....	2
3. KONDISI EKONOMI.....	4
a. Potensi unggulan Nagari.....	4
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	5
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI.....	6
A. Visi dan Misi.....	6
B. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari (sesuai Rencana Pembanguna.....	6
Menengah Nagari.....	6
BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.....	8
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN NAGARI.....	8
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi.....	8
2. Target dan realisasi Pendapatan.....	9
3. Permasalahan dan penyelesaian.....	14
B. PENGELOLAAN BELANJA NAGARI.....	15
1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari.....	15
2. Target dan realisasi Belanja.....	15
3. Permasalahan dan penyelesaian.....	15
BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI.....	16
A. URUSAN HAK ASAL USUL NAGARI.....	16
1. Program dan Kegiatan.....	16
2. Permasalahan dan penyelesaian.....	20
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/ KOTA.....	20
1. Program dan Kegiatan.....	20

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	20
3. Permasalahan dan penyelesaian.....	20
BAB V : PENYEENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	21
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....	21
1. Dasar Hukum.....	21
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	21
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari.....	21
4. Pelaksanaan Kegiatan yang diterima.....	21
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	21
6. Permasalahan dan penyelesaian.....	21
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.....	21
1. Dasar Hukum.....	21
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan.....	21
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	22
4. Sarana dan Prsarana.....	22
PENUTUP.....	23

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah SWT, kita masih dapat limpahan Rahmad dan karuniaNya sehingga Kita dapat membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2016.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kinali ini adalah Laporan Kegiatan Wali Nagari Kinali pada Tahun ketiga dalam masa bakti enam tahun, Laporan ini meliputi Kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Nagari, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari, Penyelenggaraan Tugas Perbantuan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nagari yang dilandasi oleh Peraturan Nagari No : 02 tahun 2016 yang memuat tentang Program Kerja Tahun 2016.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kegiatan Wali Nagari disusun berdasarkan Program Kerja Tahun 2016 dan APB Nagari Tahun 2016, sebagai berikut :

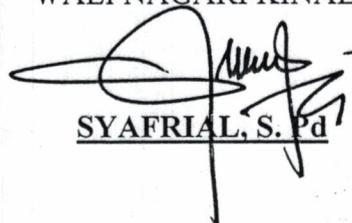
1. Kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Nagari
 - a. Pengelolaan Pendapatan Nagari
 - b. Pengelolaan Belanja Nagari
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari.
 - a. Urusan Hak Asal – Usul Nagari.
 - b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten.
3. Penyelenggaraan Tugas Perbantuan.
 - a. Tugas Perbantuan yang diterima.
 - b. Tugas Perbantuan Yang diberikan.
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya.
 - a. Kerjasama Antar Nagari.
 - b. Kerjasama Nagari dengan Pihak Ketiga.
 - c. Batas Nagari.
 - d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
 - e. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
5. Penutup.

Kami sadari bahwa Laporan ini masih terdapat kelemahan untuk itu kami minta kepada Pimpinan Beserta anggota Badan Musyawarah Nagari kinali untuk dapat memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Nagari untuk masa yang akan datang.

Demikianlah Laporan ini disusun, disajikan dan disampaikan untuk dapat dimaklumi adanya.

Durian Kilangan ,10 Februari 2016

WALI NAGARI KINALI


SYAFRIAL, S. Pd

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi, Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;

17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 74);
18. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/818/Bup-Pasbar/2016 Tentang Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
19. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/819/Bup-Pasbar/2016 Tentang Penetapan Besaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Thun 2016;
21. Peraturan Nagari Kinali Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kinali Tahun 2016;

B. GAMBAR UMUM

1. KONDISI GEOGRAFIS

- Ketinggian dari permukaan laut+46 M
- Letak Geografis $00^{\circ} 03' LU - 00^{\circ} 11' LS$ dan $99^{\circ} 45' BT - 99^{\circ} 03' BT$

Luas Wilayah Nagari Kinali 365,57 Km2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari koto baru kecamatan Luhak Nan Duo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tigo Nagari, dan Kabupaten Agam.
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tigo Nagari kabupaten pasaman
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Katiagan/ Mandiangin.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Nagari Kinali berdasarkan Laporan petugas Registrasi ke pendudukan Nagari Kinali tahun 2016.

MUTASI PENDUDUK MENURUT NAGARI

Nagari / Jorong	Lahir	Mati	Datang	Pindah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Langgam	45	8	19	20
Ampek Koto	11	8	5	5
Limau Puruik	20	1	26	17
Bandua Balai	19	7	3	23
Koja	19	2	10	16
Ampek Koto Barat	21	9	33	22
Anam Koto Utara	9	1	18	11
Anam Koto Selatan	29	2	3	9
Sigunanti	15	6	15	17
Bancah Kariang	18	5	1	31
Langgam Saiyo	18	0	11	16

Bunuik	14	6	4	24
Langgam Sepakat	12	11	8	6
Padang Canduah	12	2	14	33
Tandikek	36	11	10	44
Mudiak Labuah	21	9	15	8
Limpato	43	1	10	31
Jumlah	362	89	205	333

- Kelahiran 362 jiwa.
- Jumlah Kematian 89 jiwa.
- Jumlah Datang 205 jiwa.
- Jumlah Pindah 333 jiwa.

PENDUDUK PER JENIS KELAMIN

(1)	Nagari / Jorong	Penduduk			Sex Ratio
		L	P	L+P	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	Langgam	3.805	3.590	7.395	
	Ampek Koto	3.807	3.511	7.318	
	Limau Puruik	2.815	2.624	5.439	
	Bandua Balai	2.638	2.619	5.257	
	Koja	2.021	1.933	3.954	
	Ampek Koto Barat	2.557	2.490	5.047	
	Anam Koto Utara	2.033	1.988	4.021	
	Anam Koto Selatan	2.114	1.985	4.099	
	Sigunanti	1.962	1.961	3.923	
	Bancah Kariang	1.643	1.606	3.249	
	Langgam Saiyo	1.510	1.347	2.857	
	Bunuik	1.402	1.310	2.712	
	Langgam Sepakat	1.446	1.394	2.840	
	Padang Canduah	1.244	1.165	2.409	
	Tandikek	1.122	1.039	2.161	
	Mudiak Labuah	760	733	1.493	
	Limpato	414	188	602	
	Jumlah	33.293	31.483	64.776	

Jumlah Penduduk 33.293 jiwa Laki- laki 31.483 jiwa perempuan 64. 776 jiwa.

**LUAS JORONG, BANYAKNYA RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK
PER NAGARI / JORONG**

(1)	Nagari	Luas (Km ²)	RT	Penddk	Rata-rata Penddk	
					KM ²	RT
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Langgam	38	1.816	7.395		4
	Ampek Koto	40	1.743	7.318		4
	Limau Puruik	12,50	1.568	5.439		4
	Bandua Balai	33	1.225	5.259		4
	Koja	12,30	1.205	3.954		4
	Ampek Koto Barat	50	1.178	5.047		4
	Anam Koto Utara	14	1.007	4.022		4
	Anam Koto Selatan	28	998	4.100		4
	Sigunanti	10	971	3.924		4
	Bancah Kariang	12,90	900	3.249		4
	Langgam Saiyo	30,20	741	2.857		4
	Bunuik	12,10	730	2.712		4
	Langgam Sepakat	34	721	2.840		4
	Padang Canduah	11,70	696	2.409		4
	Tandikek	12,50	601	2.161		4
	Mudiak Labuah	13,70	441	1.493		4
	Limpato	21,80	188	602		4
	Jumlah	386,7	16.729	64.781		

Luas Wilayah administrasi Nagari Kinali 386,7 Km².

Jumlah Kepala Keluarga/RumahTangga 16.729 Rt.

Jumlah Penduduk 64.781 Jiwa.

Rata –rata jumlah penduduk perkepala Keluarga / Rumah Tangga 4 jiwa per KK.

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Nagari

1) Perkebunan

Mayoritas wilayah Nagari Kinali didominasi oleh perkebunan sawit swasta, BUMN dan perkebunan sawit rakyat. Dinamika perkembangan Perkebunan Sawit di Nagari Kinali cukup maju pesat sehingga hal ini berdampak kepada :

- i. Meningkatnya Pertumbuhan Perkapita Anak Nagari Kinali dari tahun ketahun, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Anak Nagari hal ini sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor lainnya.
- ii. Nagari Kinali merupakan salah satu barometer perdagangan sawit di daerah Pasaman Barat Khususnya dan sekitarnya. Hal ini didukung oleh 6 Perusahaan Pabrik Sawit.
- iii. Hal ini secara langsung juga telah menambah lapangan pekerjaan baik disektor perkebunan dan juga industri.

- iv. Dampak Pertumbuhan sector perdagangan juga sangat kuat di daerah industry, hal ini dibuktikan dengan arus transportasi yang semakin padat oleh hasil industry contohnya : CPO, Kanel, cangkang sawit dan juga limbah pabrik lainnya.
- v. Dampak Pertumbuhan sector Pendidikan juga semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil Wisudawan SI & SII semakin banyak. Diharapkan dengan peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia di Nagari Kinali Kedepan akan terwujudlah VISI dan MISI Nagari Kinali.

2) Pertanian holtikultura

- i. Jagung juga merupakan Produk Unggulan, hal ini juga sangat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya Petani Jagung, dan juga telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru.
- ii. Produksi Jagung pada saat ini masih dipergunakan sebagian besar untuk bahan dasar pakan ternak yang diproduksi di beberapa kota/kabupaten disekitar Nagari Kinali misalnya di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan hanya sebagian kecil diproduksi didalam Nagari Kinali.

3) Pariwisata

Di Nagari Kinali ada beberapa objek Wisata unggulan namun hal ini belum dikelola secara professional karena investor belum ada yang tertarik dengan potensi dimaksud diantaranya:

- Muaro Bingung di Ampek Koto
- Objek Wisata Islam Ikan Larangan Silambau
- Batu Balipek di Kampung Kurai
- Pemandian Mata air di Air Meruap
- Air Terjun Siburai-burai di Durian Tibarau
- Air Terjun Siburai-burai di Durian Kandang.
- Tabek Gadang Bancah Sopan Air Meruap.

4) Keagamaan

Nagari Kinali juga merupakan salah satu daerah yang kuat dengan aliran Tasawwuf, ini dibuktikan dengan masih kuatnya aliran Tharikat Naqasabandiah yang berkembang, yang berpusat di Durian Tibarau Nagari Kinali, Syech Mudo Abdurrahman adalah seorang ulama yang menyebarkan Tasawwuf ini di daerah Nagari Kinali dan sekitarnya. Bahkan sampai saat ini diperkuat dengan berdirinya beberapa surau tharikat oleh khalifah dan Tuangku sebagai wujud dan kepedulian terhadap perkembangan Tharikat di Nagari Kinali dan Sekitarnya.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi di Nagari Kinali cukup signifikan karena didukung oleh berbagai factor perekonomian, sesuai dengan kondisi wilayah Nagari Kinali antara lain:

- Pertanian
- Perkebunan
- Perdagangan
- DII

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

A. VISI DAN MISI

1. **VISI Nagari**
“ MEMBANGUN KINALI BERBASIS PENDIDIKAN BERLANDASKAN ADAT DAN SYARAK “
2. **MISI Nagari**
 - a) Memberikan Pelayanan secara adil dan merata
 - b) Mengentaskan Buta Huruf
 - c) Meningkatkan kualitas Iman dan Tagwa
 - d) Melestarikan Adat dan Budaya, bekerjasama dengan Ninik Mamak, tokoh Adat dan tokoh Budaya.

Adapun Makna dari Misi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Membangun system dan struktur pendidikan yang sejajar dengan standar Nasional serta sesuai dengan kondisi kebutuhan nagari serta membangun sistem pelayanan yang cepat, tepat, tanggap dan dapat menjangkau seluruh pelosok daerah.
2. Membangun manajemen Pemerintahan yang professional sesuai prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
3. Membangun dan mengembangkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan antara semua komponen baik itu aparatur pemerintahan Nagari, masyarakat dan perantau.
4. Membangun struktur ekonomi yang kuat danberimbang dengan memunculkan empat wilayah pertumbuhan ekonomi dengan orientasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber penghasilan masyarakat yang produktif, lestari dan berkesinambungan.
5. Membangun kondisi social budaya masyarakat Nagari yang maju dan adaptif dijiwai falsafah Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah. Dan peran aktif dari kelembagaan adat tali tigo sapolin dan tungku tigo sajarangan.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN NAGARI

1. STRATEGI PEMBANGUNAN .

Strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi dan misi adalah:

1. Menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan dan tidak semata-mata menjadi objek pembangunan.
2. Meningkatkan , pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan pembangunan.
3. Membangkitkan daya dan kemampuan masyarakat Nagari untuk dapat berusaha sesuai dengan keterampilan dan dukungan potensi Nagari.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang professional sebagai pelayan masyarakat dan bukan sebagai penguasa.

5. Meningkatkan pemahaman hukum formal dan hukum adat sehingga tercipta masyarakat Nagari yang bermartabat dan sadar hukum.
6. Memanfaatkan momentum otonomi daerah untuk dapat menggali segala potensi sumber daya alam Nagari secara efektif, efisien dan lestari serta meningkatkan pelayanan umum masyarakat yang cepat, tanggap dan berkeadilan.
7. Meningkatkan pendidikan yang berbasis agama/ aqidah.

2. ARAH KEBIJAKAN NAGARI.

a) Arah Kebijakan Keuangan Nagari.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Nagari Kinali periode tahun 2015 – 2020 adalah :

1. Meningkatkan manajemen Pemerintahan Nagari.
2. Pelaksanaan pembangunan dengan pola pemberdayaan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan restrukturisasi manajemen Pemerintahan Nagari.
3. Reorientasi dan restrukturisasi manajemen pendidikan serta rekayasa social dan pengayaan budaya masyarakat.
4. Restrukturisasi perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan wilayah pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan penyehatan lingkungan.
5. Nilai-nilai agama menjiwa dan mewarnai setiap perilaku dan sikap hidup masyarakat Nagari di setiap bidang kehidupan.

b). Prioritas Nagari

Skala Prioritas yang telah dilaksanakan berdasarkan musrembang tahunan dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Pasaman Barat, PNPM Mandiri, Alokasi Dana Nagari.

Pada dasarnya :

1. Dibidang Pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur Nagari.
2. Dibidang Kesehatan Pemerintah Nagari juga memprioritaskan Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan, dan juga program Penyuluhan Kesehatan, Posyandu serta lansia.
3. Dibidang Pendidikan Pemerintahan Nagari melaksanakan Sertifikasi Baca tulis Alquran bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
4. Dibidang Energi diprioritaskan pada Pembangunan PLTMH, dibidang pertambangan diprioritaskan pada pengawasan terhadap pengelolaan galian c.
5. Bidang Sosial budaya diprioritaskan kepada Pembinaan Kesenian Tradisional.
6. Bidang Ketertiban dan Keamanan diprioritaskan pada Pembangunan Sistem Keamanan Masyarakat (Siskamling).
7. Bidang Keagamaan diprioritaskan pada Penyuluhan oleh Da'I Nagari.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN NAGARI

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi

a. Intensifikasi

Intensifikasi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Nagari dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti.

Terdapat beberapa indikator yang membentuk variabel ini yaitu:

1. Memperluas basis Pendapatan, dengan item-item yang membentuknya meliputi:
 - a) Mengidentifikasi Sektor, Jenis dan potensial Pendapatan Nagari.
 - b) Memperbaiki basis data Pendapatan, penilaian
 - c) Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
Memperkuat proses pemungutan dengan item item yang membentuknya meliputi:
 - a) Mempercepat penyusunan Peraturan Nagari,
 - b) Mengubah tarif pendapatan Nagari dan peningkatan SDM.
2. Meningkatkan pengawasan dengan item-item yang membentuknya meliputi:
 - a) Pemeriksaan secara dadakan dan berkala,
 - b) Memperbaiki proses pengawasan,
3. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan item-item yang membentuknya meliputi:
 - a) memperbaiki prosedur administrasi pendapatan Nagari dan penyederhanaan administrasi pendapatan nagari.
 - b) meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
4. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan item yang membentuknya meliputi: meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Nagari dan Pemerintah Daerah. antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a) Memperluas basis penerimaan
 - b) Memperkuat proses pemungutan
 - c) Meningkatkan pengawasan
 - d) Meningkatkan efisiensi administrasi

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan Nagari yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari Sumber daya alam dan Aset Kekayaan Nagari, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Daerah dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, yakni pungutan pendapatan asli nagari yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan nagari berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Hal ini merupakan suatu ikatan yang perlu dijalin antara nagari dengan anak nagari akan pentingnya peran aktif anak nagari dalam mewujudkan Pembangunan yang sinambungan dan berkesinambungan. Ekstensifikasi pendapatan Nagari merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Nagari dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli nagari.

❖ Bagaimana Kerjasama Nagari dengan pihak perusahaan industri ?

- ❖ Mampukah Peraturan Nagari menjadi dasar hukum terhadap hasil produk perusahaan industri sebagai wujud investasikan kepada anak nagari dalam peranserta aktif Pembangunan Nagari ?
- ❖ Dalam Hal Perbankan, sudah efektifkah system kredit ditengah ekonomi global saat ini terhadap pertumbuhan perkapita anak nagari ?

Kebijakan-kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor local maupun investor asing untuk menanamkan/ menginvestasikan modalnya di Nagari.
- b. Memberi kemudahan bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit.
- c. Keseimbangan Pembangunan yang selaras dengan Sistem Adat, Basandi Syara' , Syara' Basandi Kitabullah. Ideologi ini lah yang menjadi Landasan Idiel dalam kehidupan Anak Nagari. Alam Takambang Jadi guru.
- d. Memprioritaskan investor local untuk menginvestasikan modalnya di Nagari.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Lampiran : Peraturan Nagari Kinali No. 06 Tahun 2016

Tentang :Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2016

KODE REK. NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	5.204.712.327	5.201.712.327	3.000.000
1 1	Pendapatan Asli Nagari	28.000.000	25.000.000	3.000.000
1 1 1	Hasil Usaha	3.000.000	3.000.000	
	Bada n Usaha milik Nagari	3.000.000	3.000.000	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	25.000.000	22.000.000	3.000.000
1 2	Dana Transfer	5.176.712.327	5.176.712.327	
1 2 1	Dana Nagari	1419.743.900	1.419.743.900	
	Dana Nagari dari APBN	1419.743.900	1.419.743.900	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi	290.046.512	290.046.512	
	Bagian dari Hasil Pajak Daerah	262.645.324	262.645.324	
	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah	27.401.188	27.401.188	
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)	3.454.921.915	3.454.921.915	
	Alokasi Dana Nagari (ADN)	3.454.921.915	3.454.921.915	
1 2 4	Dana Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	12.000.000	12.000.000	
	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	12.000.000	12.000.000	

1	3			Lain – lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	124.923.000	124.923.000
2				BELANJA	5.238.582.488	4.143.852.855	1.094.729.633
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	1.894.724.488	1.379.037.694	515.686.794
2	1	1		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	788.910.000	774.142.000	14.768.000
2	1	1	1	BELANJA PEGAWAI	788.910.000	774.142.000	14.768.000
2	1	2		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	772.923.488	445.466.694	327.456.794
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	605.423.488	309.357.694	296.065.794
2	1	2	3	Belanja Modal	167.500.000	136.109.000	31.391.000
2	1	3		Operasional Bamus	44.650.000	30.182.000	14.468.000
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	44.650.000	30.182.000	14.468.000
2	1	5		Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	30.783.000	9.049.000	21.734.000
2	1	5	2	Belanja barang dan Jasa	30.783.000	9.049.000	21.734.000
2	1	6		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari	99.648.000	65.598.000	34.050.000
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa	99.648.000	65.598.000	34.050.000
2	1	7		Sistem Informasi Nagari	157.810.000	54.600.000	103.210.000
				Belanja barang dan Jasa	54.600.000	54.600.000	
2	1	7	3	Belanja Modal	103.210.000		103.210.000
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1,629.865.500	1.431.548.394	198.317.106
2	2	2		Kegiatan Pembangunan jalan Desa	919.137.100	898.077.080	21.060.020
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	323.755.259	321.893.790	1.861.469
2	2	2	3	Belanja Modal	595.381.841	576.183.290	19.198.551
2	2	2		Pekerasan jalan dan Jembatan Ds I- Ds II	150.106.000	150.106.000	
2	2	2	2	Belanja barang dan Jasa	11.958.100	11.958.100	
2	2	2	3	Belanja Modal	138.147.900	138.147.900	
2	2	2		Pemb.dan Perkerasan Jalan Kapalo Banda –Hulu Aia	168.839.700	168.839.700	
2	2	2	2	Belanja barang dan jasa	12.520.100	12.520.100	
2	2	2	3	Belanja Modal	156.319.600	156.319.600	
2	2	2		Pekerasan Jalan Dusun IV Jorong Koto Gadang	156.707.500	156.707.500	
2	2	2	2	Belanja barang dan Jasa	12.156.200	12.156.200	
2	2	2		Belanja Modal	144.551.3000	144.551.3000	
2	2	2		Pembukaan Jalan Baru Air Caruik –Kp. Alai	161.471.600	161.471.600	
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	12.299.100	12.299.100	
2	2	2	3	Belanja Modal	149.172.500	149.172.500	

2	2	2		Pemb. Jalan Air Putih- Purworejo Jorong Ampek Koto Barat	103.147.100	103.147.100	
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	10.549.400	10.549.400	
2	2	2	3	Belanja Modal	92.597.700	92.597.700	
2	2	9		Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	710.728.400	533.471.314	177.257.086
2	2	9	2	Belanja Barang dan Jasa	109.836.904	98.597.698	11.239.206
				Belanja Modal	600.891.496	434.873.616	166.017.880
2	2	9		Pembangunan Gedung Serbaguna	280.862.990	280.862.990	
2	2	9	2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000	9.750.000	
2	2	9	3	Belanja Modal	271.112.990	271.112.990	
2	2	9		Pembangunan Gedung Pencacah Plastik	282.365.410	282.365.410	
2	2	9	2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000	9.750.000	
2	2	9	3	Belanja Modal	272.615.410	272.615.410	
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	832.477.000	795.467.000	37.010.000
2	3	1		Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	99.584.000	99.584.000	1.020.000
2	3	1		Penyuluhan Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa Nagari	99.584.000	98.564.000	1.020.000
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa	99.584.000	98.564.000	1.020.000
2	3	2		Pembinaan Pemuda dan Olahraga	42.500.000	40.560.000	1.940.000
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000	40.560.000	1.940.000
2	3	3		Kegiatan PKK Nagari Kinali	238.260.000	237.090.000	1.170.000
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa	238.260.000	237.090.000	1.170.000
2	3	4		Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	15.000.000	12.660.000	2.340.000
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	12.660.000	2.340.000
2	3	5		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	204.000.000	204.000.000	
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	204.000.000	204.000.000	
2	3	6		Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)	30.470.000		30.470.000
2	3	6	2	Belanja Barang dan Jasa	30.470.000		30.470.000
2	3	6		Lembaga Adat Bundo Kanduang	55.533.000	25.063.000	30.470.000
2	3	6	2	Belanja Barang dan Jasa	55.533.000	25.063.000	30.470.000
2	3	7		Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	102.000.000	102.000.000	
2	3	7	2	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000	102.000.000	
2	3	8		Kegiatan Pembinaan Masyarakat Lainnya	57.600.000	57.600.000	

2	3	8	2	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000	57.600.000	
2	3	9		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	18.000.000	17.930.000	70.000
2	3	9	2	Belanja barang dan jasa	18.000.000	17.930.000	70.000
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	881.515.500	360.124.000	521.391.500
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Wali Nagari, Perangkat dan Bamus Nagari	282.485.000	98.672.000	183.813.000
2	4	1		Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	91.973.000	73.633.000	18.340.000
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa	91.973.000	73.633.000	18.340.000
2	4	1		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bamus	33.012.000	25.039.000	7.973.000
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa	33.012.000	25.039.000	7.973.000
2	4	1		Bimbingan Teknis Pemerintahan Nagari dan Bamus	157.500.000		157.500.000
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa	157.500.000		157.500.000
2	4	5		Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani, Nelayan dan Lain-Lain	599.030.500	261.452.000	337.578.500
2	4	5		Pelatihan Tim Perumus RPJM dan RKP	55.965.000	53.885.000	2.080.000
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	55.965.000	53.885.000	2.080.000
2	4	5		Pelatihan Pelaku Pembangunan	100.296.000		100.296.000
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	100.296.000		100.296.000
2	4	5		Pelatihan Pengelolaan dan Pemeliharaan Pamsimas	30.052.000		30.052.000
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	30.052.000		30.052.000
2	4	5		Pelatihan Pengelolaan dan Pemeliharaan PLTMH	21.549.000		21.549.000
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	21.549.000		21.549.000
2	4	5		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota LPMN	30.743.000	28.643.000	2.100.000
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	30.743.000	28.643.000	2.100.000
2	4	5		Pelatihan Jahit Menjahit dan Bordir	161.870.000	156.470.000	5.400.000
2	4	5	2	Belanja barang dan Jasa	111.570.000	106.570.000	5.000.000
2	4	5	3	Belanja Modal	50.300.000	49.900.000	400.000
2	4	5		Pelatihan Pembinaan dan Pendidikan Anak Usia Dini	28.854.000	22.454.000	6.400.000
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	28.854.000	22.454.000	6.400.000
2	4	5		Pelatihan Tata Boga	123.800.000		123.800.000
				Belanja Barang dan Jasa	123.800.000		123.800.000
2	4	5		Peningkatan Kapasitas Pemuda Nagari	17.856.000		17.856.000
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	17.856.000		17.856.000
2	4	5		Pelatihan Pengelolaan dan	28.045.500		28.045.500

Pemeliharaan Aset							
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	28.045.500		28.045.500
				SURPLUS / DEFISIT	33.870.161	1.037.218.133	(1.160.188.294)
3				PEMBIAYAAN	33.870.161	263.870.161	(230.000.000)
3	1			Penerimaan Pembiayaan	263.870.161	263.870.161	-
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	263.870.161	263.870.161	-
				Sisa Penghemat Biaya Atau Akibat Lainnya	263.870.161	263.870.161	-
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	230.000.000		(230.000.000)
3	2	2		Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Nagari/Swasta	230.000.000		(230.000.000)

a. Pendapatan Asli Nagari :

Target PAN Sebelum Perubahan Tahun 2016	Rp.	133.000.000,-
Target PAN Perubahan Tahun 2016	Rp.	28.000.000,-
Pencapaian Target Tahun 2016	Rp.	25.000.000,-
Realisasi Pencapaian Target	Rp.	0,-
Sisa PAN Tahun 2015	Rp.	0,-

Dengan Uraian Sebagai Berikut :

1. Hasil Usaha Nagari

Target APB Nagari Tahun 2016	Rp.	3.000.000,-
Target APB Perubahan Nagari Tahun 2016	Rp.	3.000.000,-
Pencapaian Target	Rp.	3.000.000,-

2. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Target APB Nagari Tahun 2016	Rp.	100.000.000,-
Target APB Perubahan Tahun 2016	Rp.	25.000.000,-
Pencapaian Target	Rp.	22.000.000,-

3. Pendapatan Aset

Target APB Nagari Tahun 2016	Rp.	30.000.000,-
Target APB Perubahan Nagari Tahun 2016	Rp.	0,-
Pencapaian Target	Rp.	0,-

b. Dana Desa (APBN)

Target APB Nagari Tahun 2016	Rp.	1.419.743.900,-
Target APB Perubahan Nagari Tahun 2016	Rp.	1.419.743.900,-

Pencapaian Target	Rp. 1.419.743.900,-
Sisa	Rp. 0,-
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
Target APB Nagari Tahun 2016	Rp. 268.080.792,-
Target APB Perubahan Nagari Tahun 2016	Rp. 290.046.512,-
Pencapaian Target	Rp. 290.046.512,-
Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 290.046.512,-
Sisa	Rp. 0,-
d. Dana A D N Nagari Tahun 2016	
Jumlah dana A D N Tahun 2016	Rp. 3.371.776.159,-
Realisasi A D N Tahun 2016	Rp. 3.454.921.915,-
Sisa Dana A D N	Rp. 83.145.756,-
e. Bantuan Keuangan Provinsi	
Jumlah Dana Tahun 2016	Rp. 12.000.000,-
Realisasi Tahun 2016	Rp. 12.000.000,-
Sisa Dana	Rp. 0,-
f. Dana Silpa Tahun 2015	
Jumlah Dana Silpa Tahun 2015	Rp. 263.870.161,-
Realisasi Tahun 2016	Rp. 263.870.161,-
Sisa Silpa Tahun 2016	Rp. 1.390.699.794,-
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 5.201.712.327,-</u>

3. Permasalahan dan Penyelesaiannya

a. Permasalahan

- 1) Pelaksanaan Pungutan Pendapatan Asli Nagari belum maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 2) Pengawasan Pungutan belum Maksimal.
- 3) Belum adanya Perluasan Basis Penerimaan pendapatan asli Nagari.
- 4) Imbas keluarnya PERMENDES Nomor : 1 Tahun 2015 dan Isu Pungli.

b. Penyelesaian

- 1) Secara Kualitas Pungutan Pendapatan Asli Nagari harus lebih ditingkatkan mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi secara continue. Secara kuantitas perlunya sosialisasi tentang pentingnya peran aktif anak Nagari dalam berpartisipasi mewujudkan pembangunan.

Perlunya peningkatan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

- 2) Perlunya peningkatan pengawasan secara terpadu baik secara administrasi maupun motivasi terhadap anak nagari.
- 3) Perlunya peningkatan Perluasan Basis Penerimaan Pendapatan Asli Nagari terutama tentang pengelolaan hasil perkebunan dan hasil industri. hal ini sangat dominan karena produk unggulan Nagari kinali pada saat ini bertolak dari sector perkebunan dan industry penunjangnya.
- 4) Perlunya Penjelasan PERMENDES No :1 Tahun 2015 dan sosialisasi Pelaksanaan Pungutan yang dilakukan.

B. PENGELOLAAN BELANJA NAGARI

1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari
2. Target dan realisasi belanja

Realisasi APB Tahun 2016 dari rencana

Rp. 5.201.712.327,- X 100 % = 80,00 %
Rp.4.164.494.194,-

3. Permasalahan dan Penyelesaian

1. Sumber Daya Manusia di Nagari yang masih sangat minim baik secara kualitas dan kuantitasnya. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
2. Masih Kurangnya Pengkajian dan Penggalian Potensi Pengelolaan Sumber Daya alam dan juga hasil Industri serta limbah industri.(Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
3. Tidak jelasnya pelimpahan dan juga rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan juga Hasil industri serta limbah Industri. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)
4. Perawatan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal pemberdayaan dan pengelolaannya oleh kelompok masyarakat.(Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)
5. Anak Nagari mayoritas tidak memahami akan idiologi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Sebagai Landasan Idiel dalam kehidupan bernagari. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
6. Banyaknya sengketa tanah. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
7. Beberapa Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan yang berakibat kontradiktif ditengah masyarakat. Sehingga berdampak kepada hasil pembangunan yang lainnya.(Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
8. Masih minimnya produk hukum nagari tentang pengelolaan sumber daya alam dan hasil industri.
9. Jumlah penduduk yang belum tertata dengan baik.
10. Tapal batas keporongan yang belum jelas .

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. URUSAN HAK ASAL USUL NAGARI

1. Program dan kegiatan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Nagari Kinali Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kinali (RPJM-Nagari)
2. Perna 03 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2016
3. Peraturan Nagari nomor : 06 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB)Nagari Kinali Tahun 2016

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan

- Pembangunan Jalan Usaha Tani Purworejo Jorong Ampek Koto Barat
 - Biaya Rp. 103.147.100,-
- Pembangunan Jalan Rabat Beton di Kejorong Ampek koto
 - Biaya Rp. 178.865.200,-
- Pembangunan Jalan Air Carut –Kp Alai Jorong bandua Balai
 - Biaya Rp. 161.471.600,-
- Pembangunan Jalan dan Jembatan Dusun I dan Ds II Jorong Mudiak Labuah
 - Biaya Rp. 150.106.000,-
- Pembangunan jalan Kapalo Banda Jorong Sigunanti
 - Biaya Rp. 168.839.700,-
- Pembangunan Jalan Dusun IV Jorong Koja
 - Biaya RP. 156.707.500,-
- Pembangunan Gedung Serba Guna jorong Limau Puruik
 - Biaya Rp. 280.862.990,-
- Pembangunan Gedung Pengolahan Sampah Plastik Jorong Bancah kariang
 - Biaya Rp. 282.365.410,-

Pembangunan tersebut telah terlaksana 100 % dan Hasil Pembangunan adalah merupakan barang inventaris Nagari, yang selanjutnya tercatat dalam Buku Inventaris Nagari Kinali, Kartu Inventaris Barang (KIB) D

Kegiatan Pembinaan Masyarakat Nagari

1. Kerapatan Adat Nagari

Kegiatan Kerapatan adat Nagari, menggacu kepada Rencana Kegiatan Anggaran Lembaga bersangkutan diprioritaskan kepada pengkajian diskusi terbatas undang-undang no. 6 tahun 2014, hal ini menyikapi apakah, bagaimana, mengapa tindak lanjut strategi pelaksanaan pemerintahan Nagari Kedepan dan sebagian lain diperuntukan untuk belanja Barang dan jasa serta belanja modal KAN Kinali untuk tahun 2016. Kegiatan-kegiatan yang di rencanakan serta dituangkan dalam RKA Kelembagaan diatas tidak terlaksana, Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu serta ketidaksiapan lembaga dan Kepala Urusan yang bersangkutan.

2. Kegiatan Bundo Kandung

Kegiatan Bundo Kandung Nagari diprioritaskan kepada Pelatihan Bundo Kandung . Kegiatan Pelatihan tersebut telah telah di laksanakan pada 18 November Tahun 2016, yang bertempat di kantor KAN Kinali dengan jumlah peserta 60 orang.

Tujuan diselenggarakannya Pelatihan bundo Kandung sekanagarian Kinali bagi Bundo kandung ini adalah untuk memberikan pemahaman dan peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dalam Adat istiadat kegiatan telah berjalan dengan baik.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peran dan fungsi bundo kandung dalam tatanan adat istiadat dan bagaiman seorang bundo kandung itu dalam mengayomi keluarga dan masyarakat setempat.

3. Kegiatan Bhabinkamtibmas/Bhabinsa/Linmas

Kegiatan Bhabinkamtibmas/Bhabinsa/Linmas Nagari diprioritaskan kepada Penyuluhan kepada Masyarakat disetiap Kejorongan di Nagari Kinali, Pemberian Uang penggantian tranfortasi bagi anggota linmas , serta pengadaan barang dan jasa guna menunjang kegiatan tersebut.

4. Kegiatan PKK Nagari

PKK Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan 10 Program Pokok PKK, salah satu diantaranya berupa pembinaan kepada Tim Penggerak PPK Kejorongan berupa pembinaan Dasawisma.

Disamping itu ada Kegiatan Rutin Seperti senam Sehat dan Pertemuan Bulanan Di Setiap Kejorongan yang dilaksanakan di kediaman Kepala Jorong Guna mempererat Hubungan Silaturahmi antara PKK Kejorongan, PKK Nagari, dan Masyarakat.

5. Kegiatan LPMN

Kegiatan LPM Nagari Kinali Pada Tahun anggaran 2016 yaitu menyusun rencana Pembangunan Partisipasif, Menggerakkan dan mengembangkan Partisipasi, Gotong Royong, dan Swadaya Masyarakat dlam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta Penampungan dan penyaluran Aspirasi Masyarakat dalam pembangunan.

6. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

Untuk kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga tahun 2016, Pemerintah Nagari Kinali melaksanakan pemberian bantuan berupa sarana dan parasarana olahraga berupa pemberian barang, diantaranya Kostum dan Bola. Clup olahraga yang dapat bantuan tahunn 2016, dapat kami rinci sebagai berikut: Bola Kaki sebanyak 14 Klub berupa Bola dan Kostum, Bola Futsal sebanyak 8 Klub berupa Bola dan Kostum , Voly Ball sebanyak 26 klup berupa Bola Volly dan Kostum, maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan Pemuda sehat dan Olah Profesional , serta menekan penggunaan narkoba dan sitotropika.

7. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya

Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya tahun 2016 , Pemerintah Nagari Melaksanakan Pembinaan berupa pemberian bantuan kelengkapan alat-alat dan Pakaian kesenian tradisionalnya. Tahun 2016 kita memberikan bantuan kepada enam kelompok kesenian tradisional .

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk menjaga kelestarian dan juga untuk mengembangkan bakat seni Budaya dan tradisi yang di masyarakat .

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

1. Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJM dan RKP Nagari

Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJM dan RKP Nagari Kinali pada Tahun 2016 bersumber dari Dana Desa tahun Anggaran 2016 dan terlaksana dengan baik dan Jumlah Realisasi Rp. 53.885.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 17 s/d 19 Oktober 2016 di Hotel Grand Royal Denai Bukitinggi dengan Jumlah Peserta Pelatihan terdiri dari 11 Orang Tim Perumus RPJM dan 9 orang Tim Perumus RKP.

Tujuan diselenggarakannya Pelatihan Tim Perumus RPJM dan RKP bagi Tim Perumus RPJM dan RKP ini adalah untuk memberikan pemahaman dan peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dalam rangka penyusunan RPJM dan RKP guna tindak lanjut penyusunan APB Nagari tahun 2017 sesuai dengan perubahan Kebijakan Pemerintah khususnya Penataan Nagari.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan kompetensi Tim Perumus RPJM dan RKP dalam rangka penyusunan RPJM dan RKP Nagari sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperuntukan untuk Pelatihan Penyusunan RPJM dan RKP Nagari.

2. Kegiatan Pelatihan Pembina Paud

Kegiatan ini bersumber dari Dana Desa tahun 2016, Kegiatan Pelatihan Pembina Paud telah terealisasi dengan dengan baik sesuai dengan jumlah realisasi anggaran Rp. 28.854.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Kegiatan pelatihan Pembina Paud pada Nagari Kinali tahun anggaran 2016 dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 21 Desember 2016 dengan Jumlah Peserta 89 Orang Pendidik PAUD, 5 Orang Narasumber, 4 orang panitia (TPK).

Latar belakang Pelatihan Pembina PAUD adlah meningkatkan Mutu Pendidikan di masyarakat sejak usia didni khususnya PAUD, maka diharapkan meng upgraid diri dengan peningkatan Kapasitas Pendidikan dan terutama Kapasitas tenaga Penddidik itu sendiri.

Tujuan dari Pelatihan Pembina PAUD ini adalah Agar Mutu Pendidikan yang berbasis masyarakat sesuai visi dan misi Nagari terwujud.

3. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bamus

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari Kinali tahun anggaran 2016 dilaksanakan pada tanggal 06 sampai dengan 09 Oktober tahun 2016 yang bertempat di Pusdiklat Regional Bukitinggi yang dihadiri oleh 11 orang Peserta dengan Jumlah Realisasi Anggaran Rp. 25.039.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Maksud dan Tujuan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari Kinali tahun anggaran 2016 adalah :

- a. Meningkatkan Kemampuan Kinerja Bamus Nagari sebagai Mitra Nagari
- b. Meningkatkan Sumber Daya Bamus Nagari sebagai fungsi Pengawasan.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Bamus Nagari sebagai Fungsi berdasarkan Kewenangannya.
- d. Meningkatkan Sumber Daya Bamus Nagari sebagai fungsi pembuat peraturan Nagari.

4. Kegiatan Pelatihan Jahit Menjahit dan Bordir

Kegiatan Pelatihan Jahit menjahit dan Bordir di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat pada tahun Anggaran 2016 dilaksanakan di Balerong Nagari Kinali pada tanggal 31 Oktober s/d 19 November tahun 2016 dengan jumlah peserta 30 Orang. Jumlah Dana terealisasi adalah Rp. 156. 471.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Dalam pelatihan tersebut telah merealisasikan pembelian alat yang dibutuhkan dalam kegiatan.

Maksud dan tujuan Kegiatan Pelatihan Jahit menjahit dan Bordir di Nagari Kinali adalah :

- a. Meningkatkan Kerampilan berwirausaha.
- b. Meningkatkan Kemandirian berusaha.
- c. Meperluas dan mengembangkan kewirausahaan perjorong sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mandiri.

5. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Wali Nagari, dan Perangkat Nagari

Kegiatan Pelatihan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Wali Nagari tahun anggaran 2016 dilaksanakan pada tanggal 06 sampai dengan 09 Oktober tahun 2016 yang bertempat di Pusdiklat Regional Bukitinggi yang dihadiri oleh 27 orang Peserta dengan jumlah Realisasi Rp. 73.633.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Maksud dan Tujuan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Wali Nagari, dan Perangkat Nagari tahun anggaran 2016 adalah :

- a. Dapat memahami Konsepsi manajemen Pemerintahan Nagari.
- b. Mampu memahai RPJM, RKP dan APB Nagari.
- c. Mampu membedah Visi dan Misi Wali Nagari dan Harmonisasi.
- d. Memahami Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Etika dan Kepribadian.

6. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPMN

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPMN Nagari Kinali pada Tahun 2016 bersumber dari Dana Desa tahun Anggaran 2016 terlaksana dengan baik dan Jumlah Realisasi Rp. 28.643.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 14 s/d 16 Desember 2016 di Hotel Ghuci Simpang Ampek dengan Jumlah Peserta Pelatihan terdiri dari 10 orang. Jumlah Narasumber dari Kabupaten Pasamana Barat dan Provinsi terdiri dari 5 Orang.

Maksud dan Tujuan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPMN Nagari Kinali bagi anggota LPMN nagari Kinali ini adalah untuk memberikan pemahaman dan peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dalam rangka pemberdayaan masyarakat Nagari, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari yang mana merupakan sebagai mitra Pemerintah Nagari, guna tindak lanjut Penyusunan APB Nagari tahun 2017 sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah khususnya penataan Nagari.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan kompetensi Anggota LPMN Nagari Kinali dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang nomor : 06 tahun 2014 Tentang Desa.

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Wali Nagari Kinali melaksanakan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Tahun 2016 Dananya bersumber dari dana ADN senilai Rp. 445.466.694,- dan telah terlaksana dengan baik seratus persen.

Bumnag

Dana Bumnag yang telah disediakan tidak terealisasi, karena Pemerintah Nagari masih ragu dengan Petunjuk Teknis yang kurang jelas dari pihak yang terkait dalam proses pencairannya.

Belanja Operasional Kantor Nagari dan Bamus

Operasional Kantor dan Bamus Hampir terealisasi seratus persen, namun Ada Beberapa Belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2. Permasalahan dan penyelesaiannya

Tidak terealisasinya sebagian Dana ADN dan Dana Desa tahun 2016, disebabkan karena adanya beberapa belanja yang tidak sesuai dengan harga dilapangan, Perencanaan kegiatan pemberdayaan yang kurang sempurna dan kegiatan yang bedekatan dengan akhir tahun, sehingga untuk pelaksanaannya tidak maksimal. Dan untuk tahun 2017 pemerintah Nagari berupaya untuk lebih memaksimalkan pencairan dana ADN dan dana Desa tersebut agar dapat terealisasi secara keseluruhan, sehingga mampu meningkatkan pemerataan pembangunan disegala bidang serta menciptakan masyarakat yang sejahtera.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Program dan Kegiatan

- a. Program Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan tahun 2016.
- b. Program Percepatan Pendaftaran Tanah (BPN).

2. Realisasi Pelaksanaan kegiatan

PERDESAAN DAN PERKOTAAN	18.458 stts	Target 535.789.035,-
		Realisasi 62% (332.189.202,-)

3. Permasalahan dan penyelesaiannya

- a. Tidak jelasnya pelimpahan dan juga rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan juga Hasil industry serta limbah Industri. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan Kabupaten)
- b. Perawatan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal pemberdayaan dan pengelolaannya oleh kelompok masyarakat. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten).
- c. Belum adanya kesepakatan antara masing –masing pihak tentang tapal batas hutan lindung.
- d. Masih ada perbedaan kesepakatan antara pemerintah Kab. Pasaman dengan Kab. Pasaman Barat tentang batas wilayah administrasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari; Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari;

2. Instansi yang memberikan Pembantuan

Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari

Tim Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan retribusi daerah.

4. Pelaksanaan Kegiatan Yang Diterima

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016.

5. Sumber dan jumlah anggaran

6. Permasalahan

- a. Objek Pajak yang tercatat di dalam SPPT tidak sesuai dengan luas objek yang sebenarnya.
- b. Nama Subjek pajak banyak tidak sesuai dengan KTP dan Sertifikat.
- c. Nilai Pajak terlalu tinggi banyak masyarakat mengajukan pengurangan jumlah pajak terhutang.
- d. Objek Pajak banyak terjadi pemecahan namun di SPPT belum dipecah.
- e. SPPT banyak ganda pada pemecahan.
- f. Masih banyak tanah belum terdaftar sebagai objek pajak.

Penyelesaian

- a. Telah dilaksanakan inventarisasi permasalahan pajak pada tahun 2016.
- b. Pendaftaran tanah yang belum masuk sebagai objek pajak.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

- Undang – undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang – undang nomor 27 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuan

Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

Satuan pelaksana kegiatan Nagari

Petugas Kependudukan dan Pencatatan sipil Nagari.

Pelaksanaan Kegiatan Yang Diterima

Pelayanan dibidang Kependudukan (KK, KTP, Datang/Pindah, lahir dan meninggal).

3. Sumber dan jumlah anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemda Pasaman Barat .

4. Sarana dan prasarana

Prasarana yang diberikan adalah penyediaan blanko Kependudukan dengan Pengadaan Blanko F-1 hingga F-39.oleh Capil

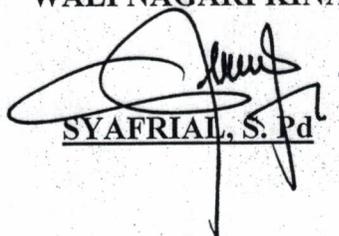
BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun, disajikan dan disampaikan untuk dapat dimaklumi adanya.

Kami sadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami minta kepada Pimpinan beserta anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kinali untuk dapat memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari untuk masa yang akan datang.

Kinali, 10 Februari 2017

WALI NAGARI KINALI



SYAFRIAL, S. Pd